



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN KARANGWARU, YOGYAKARTA

Asmawati

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

*Email Corresponding: asmawati@lecturer.unri.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 13 Oktober 2025

Revised date: 30 Oktober 2025

Accepted date: 17 November 2025

This research aims to analyze the role of stakeholders in the success of the Kotaku Program, identify stakeholders, and describe the role. This research is qualitative descriptive research conducted in Yogyakarta, precisely in Karangwaru Village. The sampling technique used was purposive sampling. The researcher conducted interviews and document reviews for collecting data. Data analysis used qualitative data analysis conducted inductively. The result of this research showed that stakeholders in the implementation of the Kotaku Program in Karangwaru were identified into 3 primary stakeholders, key stakeholders, and stakeholder support. Civilians are categorized as primary stakeholders. BKM, LPMK, and KKR as key stakeholders and the Departement PUPKP as stakeholder support. After that, each stakeholder describes its role, the community, and the PUPKP Office acts as policymakers, coordinators, implementors, and facilitators. Meanwhile, BKM, LPMK, and KKR acts as policymakers, coordinators, implementors, facilitators, and accelerators. The implication of this research is to enrich stakeholder theory by showing the success of the program due to collaboration from stakeholders.

Keyword: *Slum Upgrading, Stakeholder Collaboration, The Role of Stakeholders*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholders* terhadap keberhasilan Program Kotaku, dengan mengidentifikasi *stakeholders* serta menguraikan peranannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Karangwaru. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kajian dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru diidentifikasi menjadi 3 yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* pendukung. Masyarakat dikategorikan sebagai *stakeholder* primer. Selanjutnya BKM, LPMK, dan KKR sebagai *stakeholder* kunci dan Dinas PUPKP sebagai *stakeholder* pendukung. Setelah itu, masing-masing *stakeholder* menjabarkan peranannya, masyarakat dan Dinas PUPKP berperan sebagai pembuat kebijakan, koordinator, implementor, dan fasilitator. Sedangkan BKM, LPMK, dan KKR dalam Pelaksanaan Program Kotaku di Karangwaru berperan sebagai pembuat kebijakan, koordinator, implementor, fasilitator, dan akselerator. Implikasi dari penelitian ini adalah memperkaya teori *stakeholder* dengan menunjukkan keberhasilan program karena adanya kolaborasi dari para pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Kota Tanpa Kumuh, Kolaborasi Stakeholder, Peran Stakeholders

PENDAHULUAN

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) sebagai salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani permasalahan kumuh yang ada di perkotaan dengan menerapkan platform kolaborasi dalam pelaksanaannya (Kementerian Pekerjaan Umum, 2018). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anshell dan Gash bahwa untuk mengatasi suatu permasalahan yang dinamis dan kompleks tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan (Mosley & Park, 2022). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten dari 34 provinsi sebagai wadah untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Kementerian Pekerjaan Umum, 2017).

Karangwaru sebagai salah satu dari sekian wilayah yang ada di Yogyakarta yang dihadapkan pada permasalahan kumuh, terlebih kelurahan ini dilalui oleh 2 sungai yakni Sungai Buntung dan Sungai Code. Sungai tersebut digunakan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka salah satunya untuk mencuci pakaian serta menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah/limbah. Karangwaru belum memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) sehingga mereka memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan dan menyebabkan sungai menjadi dangkal dan kotor (Irfani & Winarni, 2018). Dari 14 rukun warga (RW) yang terdapat di Kelurahan Karangwaru, delapan di antaranya dikategorikan sebagai pemukiman kumuh (Antara News, 2019).

Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan kumuh di Kelurahan Karangwaru, pemerintah melaksanakan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada tahun 2016 (Warta Jogja, 2018). Adapun Program Kotaku di Karangwaru fokus pada penataan kawasan Sungai Buntung karena pada kawasan ini sudah mencakup semua aspek permasalahan permukiman seperti kemiskinan, kesehatan, sanitasi, dan kumuh miskin (Kementerian Pekerjaan Umum, 2018).

Setelah adanya Program Kotaku, Karangwaru berhasil merevitalisasi Sungai Buntung, pembangunan akses jalan sepanjang 1.336 m, 2 unit

jembatan penghubung, 14 unit shelter, 11 unit ruang terbuka hijau (RTH) dan 2 unit *septic tank* komunal (Idris, 2017). Keberhasilan yang diraih oleh Karangwaru merupakan bukti adanya keterlibatan pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, dan penduduk lokal (Danso-Wiredu & Midheme, 2017).

Keberhasilan yang diperoleh Karangwaru ternyata masih terdapat beberapa kendala di dalamnya seperti masih ada segmen yang belum berjalan dari 6 segmen berdasarkan skala prioritas masih tersisa 3 segmen. Kemudian salah satu tujuan dari Program Kotaku yakni terbentuknya Pokja PKP (Kementerian Pekerjaan Umum, 2018). Namun berdasarkan wawancara dengan Koordinator BKM diketahui bahwa Pokja PKP belum terbentuk. Dikatakan bahwa Program Kotaku tidak bisa berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya tidak terjalin kerja sama yang baik antar pemerintah pusat, provinsi, dan kota serta melibatkan masyarakat secara penuh dalam proses pembangunan (Warta Jogja, 2018). Kunci utama melembagakan perbaikan kawasan kumuh yaitu dengan cara menciptakan hubungan yang baik dari berbagai *stakeholder* terkait serta meningkatkan partisipasi secara maksimal dalam pembangunan tersebut (French et al., 2019).

Karangwaru walaupun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, namun sudah menunjukkan keberhasilan dalam menangani pemukiman kumuh yang merupakan salah satu bukti adanya kolaborasi dari para *stakeholder*. Maka dalam penelitian ini akan menganalisis peran *stakeholders* terhadap keberhasilan Program Kotaku, mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholders* serta menguraikan peran masing-masing *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive*, karena pada penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan program Kotaku. Adapun informannya yakni: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta, Ketua BKM Tridaya Waru Mandiri,

Kelurahan Karangwaru, Ketua Komunitas Karangwaru Riverside dan masyarakat di Kelurahan Karangwaru. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan, lalu menyintesis ke dalam variabel-variabel yang sudah ditentukan pada kerangka berfikir, selanjutnya mengolah data, analisis, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran *Stakeholders* dalam Keberhasilan Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru

Setelah Program Kotaku masuk hingga program tersebut terlaksana Kelurahan Karangwaru dinilai sebagai kelurahan yang berhasil. Keberhasilan Karangwaru menyebabkan kelurahan tersebut dipilih sebagai tempat untuk *me-launching* Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Launching yang diadakan di Kelurahan Karangwaru tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah atas terlaksananya Program Kotaku di Karangwaru.

Kemudian Karangwaru juga berhasil meraih penghargaan BKM terbaik se-Indonesia tahun 2017 dalam rangka pengentasan pemukiman kumuh (Warta Jogja, 2017). Adapun kunci dari keberhasilan ini adalah adanya kolaborasi yang baik antar pihak. Selanjutnya keberhasilan yang diraih oleh Kelurahan Karangwaru sudah terdengar sampai ke negara luar. Koordinator BKM Tridaya Waru Mandiri ditunjuk sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia untuk mempresentasikan Karangwaru di depan perwakilan-perwakilan Negara lainnya dalam acara *World Urban Forum* di Malaysia. Keberhasilan-keberhasilan yang sudah diperoleh Karangwaru merupakan bukti bahwa pentingnya keterlibatan *stakeholders* dalam melaksanakan Program Kotaku, karena program ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada kerjasama dengan para *stakeholders*.

b. Pengklasifikasian *Stakeholders* dalam Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru

Para *stakeholders* akan dikelompokkan ke dalam 3 jenis *stakeholders* menurut Maryono et al dalam (Handayani & Warsono, 2017) sebagai berikut:

1. *Stakeholder* Primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang menerima dampak secara langsung. Biasanya *stakeholder* primer ini terlibat secara keseluruhan dalam tahapan-tahapan kegiatan. Kemudian yang termasuk dalam kategori *stakeholder* primer dalam pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru adalah masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan masyarakat Kelurahan Karangwaru sebagai *stakeholder* yang menerima dampaknya secara langsung yakni berupa tidak ada kekumuhan lagi di tempat tinggal mereka.

2. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh penting demi menunjang kelancaran suatu kegiatan. Adapun *stakeholder-stakeholder* yang termasuk *stakeholder* kunci dalam pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru adalah BKM Tridaya Waru Mandiri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Komunitas Karangwaru Riverside. BKM dan LPMK menjadi satu kesatuan agar Program Kotaku ini bisa berjalan mulai dari melakukan perencanaan, melakukan pendekatan ke masyarakat hingga mencari dana. Begitu juga dengan KKR, mereka ikut membantu LPMK dan BKM dalam mewujudkan Program Kotaku ini agar berjalan dan untuk jangka panjangnya KKR sendiri juga menggerakkan masyarakat dalam melakukan perawatan.

3. *Stakeholder* Sekunder

Stakeholder sekunder merupakan *stakeholder* yang berperan sebagai perantara dalam proses penyampaian kegiatan. Dalam pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru *stakeholder* yang termasuk dalam kategori ini adalah Dinas PUPKP (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta). Hal ini disebabkan Dinas PUPKP hanya sebagai pendorong serta memfasilitasi kelurahan dalam menjalankan Program Kotaku.

c. Peran *stakeholders* dalam Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru

Ada 5 macam peran *stakeholders* yaitu pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator (Destiana et al., 2020).

1. Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan yang dimaksud disini adalah *stakeholder* yang terlibat secara penuh dalam Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru baik dalam pembuatan serta pengambilan keputusan. *Stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru yang memiliki peranan sebagai pembuat kebijakan antara lain Dinas PUPKP, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dan masyarakat setempat. BKM dan LPMK diketahui ikut terlibat di dalam pembuatan keputusan, dibuktikan dengan adanya dokumen RTPLP yang digunakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan di Kelurahan Karangwaru. Masyarakat juga berperan sebagai pembuat kebijakan, namun tidak semua masyarakat diikutsertakan secara langsung melainkan diwakilkan oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya Dinas PUPKP dalam hal pembuat kebijakan juga ikut terlibat.

2. Koordinator

Koordinator merupakan *stakeholders* yang memiliki peran sebagai pihak yang mengontrol kinerja *stakeholders* lainnya serta keterlibatan *stakeholders* dalam sosialisasi Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru. Adapun peran koordinasi dalam hal mengontrol kinerja benar-benar dilakukan oleh para *stakeholders* seperti BKM, LPMK, KKR, dan masyarakat. Kontrol dilakukan dengan banyak cara yakni melakukan pendampingan, pengawasan serta melakukan pertemuan. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan program tidak terjadi kesalahan yang bisa berdampak ke masyarakat Karangwaru. Untuk Dinas PUPKP tidak begitu terlibat dalam melakukan kontrol. Mereka hanya *mensupport* dan bekerja sama dengan para Pokja agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun kenyataannya sampai saat ini Pokja tersebut belum ada wujudnya.

Kemudian untuk sosialisasi program melibatkan BKM, LPMK, KKR serta masyarakat Karangwaru. Sedangkan untuk pihak pemerintah sendiri tidak begitu terlibat dalam sosialisasi Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru. BKM, LPMK, dan KKR masing-masing menjalankan tugas mereka dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

sebagaimana tercantum dalam tugas pokok dan fungsi. Namun sosialisasi yang dilakukan oleh BKM, LPMK, dan KKR dinilai belum maksimal. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu warga sebagai berikut :

“Ada sih mbak kayaknya. Saya juga kurang tahu, sepertinya itu dilakukan pada saat ada pertemuan-pertemuan rutin. Jadi yang mengetahui ya yang datang aja mbak.” (Warga A)

3. Fasilitator

Stakeholders yang memiliki peranan sebagai fasilitator yakni *stakeholder-stakeholder* yang berperan dalam memfasilitasi keperluan apapun yang dibutuhkan baik dari segi sumber daya manusia, pendanaan serta kemudahan untuk mengakses fasilitas tersebut agar Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru bisa terlaksana. Adapun *stakeholders* yang berperan dalam memfasilitasi sumber daya manusia seperti BKM, LPMK, dan KKR yang mana memberdayakan masyarakat setempat sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Kotaku di Karangwaru. Kemudian terkait dengan sumber pendanaan, Dinas PUPKP terlibat dalam memfasilitasi pendanaan berdasarkan dana yang diperoleh dari APBN dan APBD. Selain itu, masyarakat juga turut serta membantu dalam hal pendanaan yang dilakukan secara sukarela. Selanjutnya untuk kemudahan akses, semua pihak yang terlibat dalam memfasilitasi sumber daya manusia dan pendanaan juga sudah memberikan kemudahan dengan cara *mensupport* dan keterbukaan antar pihak.

4. Implementor

Stakeholder-stakeholder yang memiliki peranan sebagai implementor merupakan *stakeholders* yang berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru. Adapun pihak yang terlibat Dinas PUPKP, BKM, LPMK, KKR serta masyarakat setempat juga terlibat sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru. Dengan adanya keterlibatan dari semua pihak, maka Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru bisa terlaksana dengan baik.

5. Akselerator

Akselerator berkaitan dengan *stakeholder* yang memberikan kontribusi paling besar sehingga Program Kotaku bisa berhasil. Kontribusi dalam memberikan informasi, antisipasi program, serta penelitian dan pengembangan. Para pemangku kepentingan yang memiliki peran sebagai akselerator yakni BKM, LPMK, dan KKR. Adanya peran akselerator dalam mempengaruhi implementor sehingga program ini bisa terlaksana. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas, berupa pemberian pelatihan dan pengembangan program oleh para tenaga ahli yang paham terkait penataan sungai dan lingkungan. Selain itu, kontribusi yang dilakukan dalam memberikan informasi, banyak cara yang dilakukan yaitu seperti melakukan presentasi secara visual serta melakukan pendekatan baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, kontribusi BKM dan LPMK dalam melakukan antisipasi terlihat dari selalu menyiapkan *back up plan* untuk mengatasi masalah yang ada.

KESIMPULAN

Adanya peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karangwaru menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan program. Keberhasilan Karangwaru dalam menangani pemukiman kumuh berhasil membawa Karangwaru sebagai BKM terbaik se-Indonesia pada tahun 2017. Selain itu, Karangwaru ditunjuk sebagai salah satu perwakilan Indonesia untuk mempresentasikan Karangwaru dalam acara *World Urban Forum* yang diadakan di Malaysia. Ini membuktikan bahwa Program Kotaku bisa berjalan dengan baik karena adanya peran dari *stakeholders* yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Walaupun sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menangani pemukiman kumuh, tetapi masih terdapat beberapa segmen yang belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena dana program dialihkan untuk kepentingan yang lain.

Stakeholders yang terlibat dalam Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru yaitu Dinas PUPKP, BKM, LPMK, KKR, dan masyarakat setempat. Dinas PUPKP diidentifikasi sebagai *stakeholder* sekunder dikarenakan hanya sebagai pendorong dan memfasilitasi Karangwaru dalam pelaksanaan program. BKM, LPMK, dan KKR diidentifikasi sebagai *stakeholder* kunci karena kehadiran mereka dalam pelaksanaan Program Kotaku memiliki pengaruh penting dalam keberlangsungan Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru. Selanjutnya masyarakat termasuk ke dalam *stakeholder* primer karena masyarakat sebagai

pihak yang menerima dampaknya secara langsung dengan adanya Program Kotaku.

Kemudian dari pengklasifikasian *stakeholders* tersebut dapat memberikan gambaran terkait *stakeholders* mana saja yang terlibat dalam keenam peran yakni pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, akselerator, dan evaluator. *Stakeholder* yang terlibat dalam pembuat kebijakan yakni Dinas PUPKP, BKM, LPMK, KKR, dan masyarakat. *Stakeholder* yang berperan sebagai koordinator dalam hal ini mengontrol kinerja dan sosialisasi yakni BKM, LPMK, KKR, dan masyarakat. Walaupun dalam melakukan sosialisasi dinilai masih kurang maksimal. Selanjutnya *stakeholder* yang berperan sebagai fasilitator terkait sumber daya manusia yakni BKM, LPMK, dan KKR. Untuk pendanaan pihak yang terlibat Dinas PUPKP dan masyarakat. Kemudian terkait kemudahan akses masing-masing pihak terlibat. *Stakeholder* yang berperan sebagai implementor yakni Dinas PUPKP, BKM, LPMK, KKR, dan masyarakat. Peran sebagai akselerator yakni BKM dan LPMK, sedangkan KKR hanya terlibat dalam memberikan informasi. Peran sebagai evaluator yang terlibat Dinas PUPKP, BKM, LPMK, KKR, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2019). Membangun Semangat Menata Kawasan Kumuh dari Karangwaru Yogyakarta. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/1027264/membangun-semangat-menata-kawasan-kumuh-dari-karangwaru-yogyakarta>
- Danso-Wiredu, E. Y., & Midheme, E. (2017). Slum upgrading in developing countries: lessons from Ghana and Kenya. *Ghana Journal of Geography*, 9(1).
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2). <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.18>
- French, M., Popal, A., Rahimi, H., Popuri, S., & Turkstra, J. (2019). Institutionalizing participatory slum upgrading: a case study of urban co-production from Afghanistan, 2002–2016. *Environment and Urbanization*, 31(1). <https://doi.org/10.1177/0956247818791043>

- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6.
- Idris, M. (2017). Gandeng Masyarakat, Pemerintah Sulap Kawasan Karangwaru Jadi Cantik. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3420243/gandeng-masyarakat-pemerintah-sulap-kawasan-karangwaru-jadi-cantik>
- Irfani, I., & Winarni, F. (2018). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta. *Efektivitas Program Kota*, 3(3).
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2017). *Tentang KOTAKU*. <https://epkp.ciptakarya.pu.go.id/pemberdayaan>
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2018). *Program Kotaku Percepat Penanganan Kawasan Kumuh*. <https://epkp.ciptakarya.pu.go.id/berita/p/program-kotaku-percepat-penanganan-kawasan-kumuh>
- Mosley, J. E., & Park, S. (2022). Service Providers' Influence in Collaborative Governance Networks: Effectiveness in Reducing Chronic Homelessness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(1), 130–149. <https://doi.org/10.1093/jopart/muab013>
- Warta Jogja. (2017). BKM Tridaya Waru Mandiri Karangwaru Terbaik Nasional dalam BKM Awards 2017, Wakil Walikota: OPD lain Harus Ikuti Cara Kerja yang Prestasi. *Warta Jogja*. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/5760/BKM-Tridaya-Waru-Mandiri-Karangwaru-Terbaik-Nasional-dalam-BKM-Award-2017l-Wakil-Walikota-OPD-lain-Harus-Ikuti-Cara-Kerja-yang-Prestasi>
- Warta Jogja. (2018). Wujudkan Kota Tanpa Kumuh, Semua Pihak Harus Berkolaborasi. *Warta Jogja*. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6466>